

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kabupaten Bogor merupakan bukan merupakan daerah yang masuk kedalam penghitungan IHK di Jawa Barat, namun terkait perkembangan harga kebutuhan pokok dan penting setiap minggu dapat dilihat melalui rilis yang dikeluarkan oleh BPS yaitu IPH series. (Indeks Perkembangan Harga).

Ø IPH pada bulan Januari Tahun 2025 yaitu  $M1 = 0,75\%$ ,  $M2 = 1,18\%$ ,  $M3 = 1,03\%$ , dan  $M5 = 0,72\%$ , sehingga pada bulan Januari mengalami inflasi yang sangat stabil, dimana upaya pengendalian inflasi terus dilakukan sehingga harga dapat dikendalikan serta ketersediaan barang cukup dan daya beli masyarakat juga stabil walaupun setelah menghadapi tahun baru. Beberapa komoditi tetap memiliki andil dalam indeks perkembangan harga seperti di beberapa komoditas, sedangkan andil IPH dipengaruhi oleh CABAI RAWIT(1.2368), CABAI MERAH(0.7508), TELUR AYAM RAS(0.198) dan fluktuasi tertinggi pada Cabai Rawit mencapai 0,116% terjadi pada Minggu Ke Dua.

Ø Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kabupaten Bogor pada bulan Januari 2025 dari 11 komoditas yang dipantau harganya setiap minggu di tingkat pedagang, hampir seluruh komoditas mengalami kenaikan harga, kecuali pada Lima komoditas yang mengalami penurunan harga yaitu Beras Premium, Beras Medium, Telur Ayam Ras, Minyak Kita dan Cabai Rawit Merah.

Ø IPH pada bulan Februari Tahun 2024 yaitu  $M1 = -0,69\%$ ,  $M2 = -1,07\%$ ,  $M3 = -1,11\%$ ,  $M4 = -0,45\%$  Penurunan harga terbesar terjadi pada M3, diikuti oleh M2, mencerminkan bahwa pasar tradisional dan pasar utama mengalami deflasi yang lebih dalam dibandingkan pasar induk (M1) dan toko modern (M4). Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan deflasi yang lebih kuat di tingkat konsumen lokal, kemungkinan disebabkan oleh melimpahnya pasokan pangan, memasuki musim panen, atau adanya penurunan permintaan musiman pasca perayaan akhir tahun. Sementara itu, harga di pasar modern relatif lebih stabil meskipun tetap mengalami sedikit koreksi. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan kecenderungan melandainya harga pangan di berbagai tingkat distribusi, yang perlu dicermati untuk memastikan stabilitas harga di bulan-bulan berikutnya. Deflasi terdalam terjadi pada komoditas cabai rawit dengan penurunan harga sebesar -0,5866.

Ø Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kabupaten Bogor pada bulan Februari 2025 dari 11 komoditas yang dipantau harganya setiap minggu di tingkat pedagang, rata-rata seluruh komoditas mengalami penurunan harga, kecuali pada komoditas Beras Medium, Gula Pasir dan Bawang Putih

Ø IPH pada bulan Maret Tahun 2025 yaitu  $M1 = 5,33\%$ ,  $M3 = 3,53\%$ , bulan Maret berada pada IPH yang sangat tinggi dan mengalami inflasi yang cukup tinggi masih melebihi target inflasi Pemerintah ( $2,5 \pm 1\%$ ), dimana masih dipengaruhi juga oleh daya beli masyarakat yang mulai naik karena kebutuhan konsumsi puasa dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, perubahan cuaca dimana stock barang mulai berkurang dan terjadi kenaikan harga di beberapa komoditas, fluktuasi tertinggi pada Cabai Rawit mencapai 2,05% sedangkan andil IPH dipengaruhi oleh Cabai Rawit (1,46), Daging Sapi (0,92) dan Bawang Merah (0,88)

Ø Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kabupaten Bogor pada bulan Maret 2025 dari 11 komoditas yang dipantau harganya setiap minggu di tingkat pedagang, rata-rata seluruh komoditas mengalami Kenaikan harga, kecuali pada komoditas Cabai Rawit Hijau dan kedelai yang mengalami penurunan harga.

Ø Pada Triwulan I Tahun 2025, kondisi perekonomian Kabupaten Bogor dari sisi harga pangan menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif namun masih dalam kendali. Bulan Januari mencatat inflasi yang stabil berkat upaya pengendalian harga dan ketersediaan stok yang cukup, dengan kontribusi utama berasal dari komoditas cabai rawit, cabai merah, dan telur ayam ras. Februari mengalami deflasi signifikan akibat melimpahnya pasokan pangan pasca musim panen dan penurunan permintaan setelah perayaan akhir tahun, dengan penurunan harga paling dalam terjadi pada komoditas cabai rawit. Tren ini mengindikasikan bahwa pasar pangan di Kabupaten Bogor masih sangat sensitif terhadap faktor musiman dan fluktuasi pasokan.

Ø Memasuki Maret 2025, inflasi melonjak tajam, melebihi target nasional, didorong oleh meningkatnya permintaan selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri, serta berkurangnya stok barang akibat perubahan cuaca. Komoditas cabai rawit, daging sapi, dan bawang merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Kondisi ini memperlihatkan bahwa daya beli masyarakat cukup kuat untuk menahan kenaikan harga musiman, namun juga menunjukkan perlunya langkah antisipatif yang lebih kuat dalam stabilisasi pasokan pangan strategis. Secara keseluruhan, triwulan ini memperlihatkan bahwa ketahanan pangan Kabupaten Bogor relatif baik, tetapi tetap rentan terhadap gejala musiman dan perlu penguatan sistem distribusi dan cadangan pangan.

## 2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Kenaikan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Bogor selama Triwulan I Tahun 2025 terutama disebabkan oleh lonjakan permintaan musiman pasca Tahun Baru dan menjelang Ramadan, diikuti oleh berkurangnya pasokan akibat faktor cuaca yang mengganggu produksi pangan seperti cabai dan bawang. Selain itu, keterbatasan stok penyangga daerah, distribusi barang yang tidak merata antara pasar modern dan tradisional, serta ekspektasi pedagang yang menaikkan harga lebih awal karena antisipasi peningkatan konsumsi, turut mempercepat kenaikan harga di berbagai komoditas strategis.
2. Kenaikan harga minyak goreng di Kabupaten Bogor pada Triwulan I Tahun 2025, khususnya pada bulan Maret, disebabkan oleh lonjakan permintaan yang tinggi menjelang Ramadan dan Idul Fitri, di mana konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan pokok, termasuk minyak goreng, meningkat signifikan. Selain faktor musiman, distribusi pasokan minyak goreng, terutama Minyakita, mengalami hambatan, sehingga stok di tingkat pedagang menipis sementara permintaan terus bertambah. Kondisi ini diperparah dengan adanya ketidakseimbangan harga di pasar nasional, di mana harga aktual Minyakita tercatat melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, mencerminkan adanya tekanan di tingkat distribusi dan produksi. Akumulasi faktor-faktor tersebut menyebabkan harga minyak goreng di daerah seperti Kabupaten Bogor ikut terdorong naik, menambah tekanan terhadap inflasi pangan lokal.
3. Kenaikan harga cabai di Kabupaten Bogor pada Triwulan I Tahun 2025 disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, lonjakan permintaan musiman menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri meningkatkan konsumsi cabai secara signifikan. Kedua, gangguan pasokan akibat cuaca buruk, seperti hujan yang tidak terduga, mengurangi hasil panen cabai, sehingga pasokan di pasar terbatas. Ketiga, distribusi yang tidak merata antara daerah penghasil cabai dan pasar lokal memperburuk situasi, karena pasokan cabai terlambat atau terbatas. Keempat, ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan di pasar tradisional memicu pedagang untuk menaikkan harga sebagai respons terhadap kelangkaan barang. Kombinasi faktor-faktor ini menyebabkan harga cabai, terutama cabai rawit merah, melonjak tajam di Kabupaten Bogor.
4. Fluktuasi harga daging sapi, telur ayam ras, dan daging ayam ras di Kabupaten Bogor pada Triwulan I Tahun 2025 disebabkan oleh beberapa faktor utama. Kenaikan harga pakan ternak, yang mencakup komponen terbesar dalam biaya produksi, mempengaruhi harga telur dan daging ayam, sementara lonjakan harga bibit ayam (DOC) juga meningkatkan biaya produksi. Permintaan musiman menjelang Ramadan dan Idul Fitri menyebabkan peningkatan konsumsi, memperburuk tekanan pada harga. Selain itu, panjangnya rantai distribusi dari peternak hingga konsumen menambah biaya, sementara kebijakan pemerintah terkait bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan pangan juga memperburuk ketidakseimbangan pasokan dan permintaan. Semua faktor ini saling terkait, menyebabkan fluktuasi harga yang signifikan di pasar.
5. Kenaikan harga bawang putih di Kabupaten Bogor pada Triwulan I Tahun 2025 disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, penundaan impor dari negara penghasil utama seperti China menyebabkan pasokan terbatas di pasar domestik. Kedua, tingginya permintaan menjelang bulan Ramadan, ketika konsumsi bahan pangan meningkat, memperburuk tekanan pada harga. Ketiga, distribusi yang lebih lambat dalam rantai pasokan turut memengaruhi kelancaran pasokan barang ke pasar-pasar tradisional, sehingga menyebabkan kenaikan harga. Faktor-faktor ini berkontribusi pada fluktuasi harga bawang putih yang lebih tinggi di pasar.

## 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

### **I. Keterjangkauan Harga:**

1. Pemantauan dan pasokan setiap hari melalui aplikasi SIDIRGA dan SiLINDA dilakukan oleh Disdagin dan Perumda Pasar Tohaga.
2. Monitoring harga ketersediaan barang kebutuhan pokok (Sidak pasar) pada tanggal 25 Maret 2025 di Pasar Leuwiliang dan Gudang Bulog dihadiri oleh Wakil Bupati, Dandim, Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Ka.Disdagin serta Tim TPID. Sidak Pasar yang kedua dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2025 di Pasar Cibinong yang dipimpin oleh Bupati Bogor.
3. Melaksanakan Gelar Pangan Murah dengan komoditas beras SPHP, beras medium, beras premium, telur ayam, daging ayam ras, minyak goreng, gula pasir, cabe merah keriting, cabe rawit, tepung terigu, bawang merah, bawang putih, daging sapi, cabe merah besar dan sayuran. Sampai bulan Maret 2025, Dinas Ketahanan telah melaksanakan sebanyak 62 kali Gelar Pangan Murah, dimana 61 kali sumber dana APBD kab Bogor dan 1 kali berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan GPM tersebar di 40 Kecamatan dan pada tanggal 25 Maret 2025 Dinas Ketahanan Pangan menggelar Launching GPM istimewa pada 40 Kecamatan yang berpusat di Kecamatan Leuwiliang.
4. Melaksanakan Operasi Pasar dan Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI) dari Provinsi Jawa Barat. Operasi Pasar dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2025 di Pasar Cibinong dan 24 Maret 2025 di Pasar Cileungsi. OPADI dilaksanakan di Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Citeureup tanggal 17 Maret 2025.
5. Kegiatan Bazar Murah oleh KADIN bekerjasama dengan BJB dan Pemerintah Kabupaten Bogor pada tanggal 25 Februari 2025. Bazaar dilaksanakan dalam rangka pengendalian dan keterjangkauan harga menjelang bulan Ramadhan. Bazaar Murah juga dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tanggal 20 dan 21 Maret 2025 dalam rangka pengendalian dan keterjangkauan harga menjelang hari raya Idul Fitri. Bazaar dilaksanakan di Lapangan Tegar Beriman dengan komoditas bahan pokok penting dan produk-produk UMKM. Dalam rangka pengendalian harga pangan dan pe keterjangkauan harga, Bupati Bogor juga meresmikan launching Bazaar Murah di empat kecamatan yaitu Kecamatan Luwiliang, Kecamatan Tajurhalang, Kecamatan Ciawi dan Kecamatan Cileungsi yang berpusat di Kecamatan Leuwiliang.

### **II. Ketersediaan Pasokan:**

1. Penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah berupa beras serta daging dan telur ayam.
2. Cadangan Pangan Pemerintah.
3. Gerakan tanam jagung serentak 1 Ha pada tanggal 21 Januari 2025 bersama Ka.Polres Bogor di Lahan Pabrik Kelapa Sawit Cikasungka dan Gerakan Penanaman Mitigasi Bencana pada tanggal 22 Maret 2025 di Blok Naringgul lahan PTPN 1 Regional 2 bersama Menhut & Gubernur Jawa Barat
4. Membuat Surat Edaran Bupati Nomor 100.3.4.2/330/Perek Tentang Strategi Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Bogor pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 1446H / 2025

### **III. Kelancaran Distribusi:**

1. Distribusi minyak goreng, minyakita di kegiatan Gelar Pangan Murah.
2. Distribusi beras petani lokal oleh BUMD Perumda Pasar Tohaga kepada ASN dalam program beras Carita Makmur.
3. Pembangunan infrastruktur program Satu Milyar Satu Desa (Samisade) dan program lainnya.

### **IV. Komunikasi Efektif:**

1. Mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI pada tanggal 6 Januari 2025, 13 Januari 2025, 20 Januari 2025, 27 Januari 2025, 03 Februari 2025, 10 Februari 2025, 17 Februari 2025, 24 Februari 2025, 03 Maret 2025, 11 Maret 2025, 17 Maret 2025 dan 25 Maret 2025.
2. Mengikuti Rapat Koordinasi & Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 03 - 05 Februari 2025 di Kabupaten Pangandaran.
3. Mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 09 Januari 2025, 23 Januari 2025, 06 Februari 2025, 20 Februari 2025, 06 Maret 2025 dan 17 April 2025.
4. Mengadakan Rapat Pengendalian Inflasi tingkat Kabupaten Bogor setelah acara Rakor tingkat Pusat dan tingkat Provinsi Jawa Barat selesai dilaksanakan.
5. Mengadakan Rapat Koordinasi tingkat Kabupaten Bogor terkait penyusunan OPS pada tanggal 11 Maret 2025.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

### **1. Pemantauan dan Pasokan Barang**

Kebijakan pemantauan harga dan distribusi barang melalui aplikasi SIDIRGA dan SiLINDA yang dilakukan oleh Disdagin serta Perumda Pasar Tohaga telah memberikan dampak positif dalam memantau dinamika harga pangan. Selain itu, kegiatan sidak pasar yang rutin di Pasar Cibinong dan Leuwiliang pada bulan Maret 2025 memperlihatkan keterlibatan langsung dari pemerintah daerah dalam memastikan ketersediaan barang dan harga yang wajar. Meskipun demikian, distribusi barang di pasar tradisional dan modern masih menjadi tantangan, karena adanya ketimpangan harga antara kedua pasar yang berkontribusi pada fluktuasi harga yang lebih tajam, terutama pada barang-barang musiman seperti cabai dan minyak goreng.

### **2. Pelaksanaan Operasi Pasar dan Gelar Pangan Murah**

Pelaksanaan Gelar Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI) memberikan dampak signifikan dalam mengendalikan harga pangan. Program GPM yang dilaksanakan di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor pada bulan Maret 2025 mampu membantu menstabilkan harga dan memperkenalkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Meskipun demikian, keberhasilan GPM sangat bergantung pada ketepatan waktu pelaksanaan dan ketersediaan stok pangan. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap kecepatan distribusi barang agar lebih merata ke seluruh kecamatan.

### **3. Bantuan Sosial dan Bantuan Pangan Pemerintah**

Penyaluran bantuan pangan dari pemerintah, baik berupa beras, telur, maupun daging ayam, turut mendukung masyarakat dalam mengatasi kesulitan akibat lonjakan harga pangan. Namun, distribusi bantuan yang lebih terarah dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut sampai kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kebijakan ini perlu lebih dimaksimalkan dengan pemetaan yang lebih tepat tentang kebutuhan pangan masyarakat di setiap kecamatan, agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara jumlah bantuan dan tingkat kebutuhan pangan di daerah tertentu.

### **4. Strategi Pengendalian Inflasi pada Musim Puncak Permintaan**

Kebijakan strategis dalam menghadapi permintaan tinggi selama Ramadan dan Idul Fitri, melalui gelar pangan murah dan bazar murah, telah memberikan hasil yang baik dalam menstabilkan harga komoditas yang sering melonjak pada musim tersebut. Meskipun upaya ini berhasil menurunkan tekanan inflasi pada beberapa komoditas, ketergantungan yang tinggi pada pasokan musiman dan fluktuasi cuaca masih menjadi faktor yang mengancam kestabilan harga. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu merencanakan langkah antisipatif yang lebih matang dalam mengelola stok dan distribusi pangan agar harga tetap terkendali dalam jangka panjang.

### **5. Kolaborasi dan Koordinasi Antar Instansi dan Daerah**

Kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan masyarakat dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di berbagai tingkat, seperti di tingkat kabupaten dan provinsi, telah memperkuat upaya pengendalian inflasi. Namun, koordinasi yang lebih efektif antara pihak-pihak terkait perlu ditingkatkan, terutama dalam hal komunikasi dan informasi pasar. Penyusunan strategi pengendalian inflasi yang melibatkan berbagai sektor diharapkan dapat menciptakan solusi jangka panjang untuk mengatasi fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal.

## **5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.**

### **1. Penguatan Infrastruktur Distribusi Pangan**

Meningkatkan Infrastruktur Distribusi melalui pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur distribusi pangan, terutama untuk komoditas yang sering mengalami fluktuasi harga seperti cabai, bawang, dan daging. Infrastruktur yang baik akan mempercepat distribusi dari daerah penghasil ke pasar lokal, yang pada gilirannya dapat mengurangi lonjakan harga akibat keterlambatan pasokan atau biaya distribusi yang tinggi.

## **Diversifikasi Sumber Pasokan Pangan**

2.

Pengembangan Sumber Pasokan Alternati dilakukan melalui identifikasi dan pengembangan sumber pasokan alternatif untuk komoditas yang sering mengalami kelangkaan. Ini dapat mencakup kerja sama dengan petani lokal di daerah lain atau bahkan impor dalam jumlah terbatas. Dengan demikian, kestabilan pasokan pangan dapat dijaga, dan harga bisa lebih terjangkau.

### **3. Optimalisasi Sistem Pemantauan Harga**

Penguatan Sistem Pemantauan Harga Real-Time melalui aplikasi seperti SIDIRGA dan SiLINDA. Aplikasi ini akan membantu pemangku kebijakan untuk memantau pergerakan harga pangan dan segera melakukan intervensi apabila terjadi fluktuasi harga yang tidak wajar, sehingga dapat menjaga stabilitas harga di pasar.

### **4. Penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang Lebih Ketat**

Pengawasan Harga di Pasar melalui jaminan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya untuk barang-barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng, cabai, dan bawang. Pemantauan harga di pasar secara intensif akan mencegah adanya kenaikan harga yang tidak terkendali atau spekulasi harga yang merugikan konsumen.

### **5. Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah**

Pembentukan dan Pengelolaan Cadangan Pangan melalui cadangan pangan daerah yang cukup untuk mengatasi lonjakan harga akibat fluktuasi musiman atau gangguan pasokan. Pemanfaatan cadangan pangan yang efisien akan memberikan solusi jangka pendek dalam mengurangi tekanan inflasi akibat kelangkaan pasokan serta Koordinasi dengan Bulog dan Swasta: dengan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, Bulog, dan sektor swasta untuk memastikan cadangan pangan terkelola dengan baik dan tersedia saat dibutuhkan.

### **6. Dukungan kepada Petani Lokal**

Memberikan dukungan langsung kepada petani lokal untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya untuk komoditas yang rentan terhadap lonjakan harga. Dukungan bisa berupa subsidi, pelatihan, atau akses kepada teknologi pertanian modern yang dapat meningkatkan hasil produksi.

### **7. Gerakan Tanam Pangan Serentak**

Mendorong inisiatif seperti "Gerakan Tanam Pangan Serentak" yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan lokal. Melibatkan petani dari berbagai daerah penghasil pangan akan membantu mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah dan meningkatkan ketahanan pangan secara lebih berkelanjutan.

### **8. Sinergi Antar Instansi dan Pihak Terkait**

Memperkuat koordinasi antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bogor dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk memastikan kebijakan pengendalian inflasi berjalan dengan baik dan responsif terhadap permasalahan harga pangan.

Menjalin kerjasama yang lebih baik antara sektor publik, swasta, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kestabilan harga dan mengurangi dampak inflasi, serta memperkuat ketahanan pangan di daerah.